

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Isu mengenai pertahanan negara merupakan salah satu hal yang menjadi fokus studi Ilmu Hubungan Internasional disebabkan kondisi dunia yang mengalami berbagai macam konflik kepentingan. Pertahanan dan keamanan menjadi suatu usaha dalam menjaga eksistensi suatu negara. Sistem pertahanan yang kuat, menjadi perangkat dalam menghalau berbagai ancaman atau serangan yang berasal dari luar. Hal ini dapat terlihat dari beberapa negara yang memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang kuat. Negara dengan sistem pertahanan yang kuat memiliki pengaruh yang besar dalam sistem perpolitikan global. Negara adidaya (*superpower*) menempati posisi kuat yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi kesepakatan dan memasukan kepentingan nasional negaranya. Tiap negara berusaha untuk mencapai kepentingannya masing-masing dengan melakukan upaya peningkatan kekuatan nasional. Kekuatan Nasional mencakup berbagai macam unsur, salah satunya kekuatan militer.

Dalam menjalin hubungan internasional, negara merupakan aktor yang memiliki peran penting. Negara dianggap memiliki kapabilitas dalam menjaga kedaulatan wilayah, serta memelihara stabilitas keamanannya. Upaya dilakukan oleh negara dalam menjaga keutuhan wilayah dilakukan melalui kebijakan dalam dan luar negeri. Kebijakan dalam negeri melingkupi kebijakan pertahanan dan 7 kebijakan luar negeri di realisasikan dalam strategi pertahanan dan keamanan dalam mencegah ancaman dari luar, yaitu NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara dibentuk pada tanggal 4 April 1949 (NATO, hlm. 9). Pada dasarnya, NATO adalah sebuah aliansi militer regional yang mencari dukungan solidaritas diantara para anggotanya jika seandainya terjadi serangan militer ke negara anggotanya tersebut.

NATO memiliki prinsip *Collective Deffense*, yaitu bahwa setiap anggota negaranya bersedia membantu anggota NATO yang lainnya, apabila diserang

terlebih dahulu, sehingga negara-negara anggota NATO membentuk pertahanan bersama. NATO hingga saat ini memiliki 28 negara anggota, yakni dengan masuknya sejumlah negara bekas Blok Timur (Belgia, Bulgaria, Canada, Republik Czecho, Denmark, Estonia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Kroasia, Albania, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat) dan (Kroasia dan Albania menjadi anggota terakhir yang bergabung pada tahun 2009) (Sudrajat 2004, BPPK Kemenlu Vol 21 no.2).



Sumber: Peta Wilayah Anggota NATO di Eropa dan Eropa Timur, <http://nationalvanguard.org/wpcontent/uploads/2015/02/nato-map.jpg>. pada tanggal 6 Juni 2015 pukul 13.12 WIB.

Gambar 1 Wilayah NATO Expansion di Eropa dan Eropa Timur

Pada tahun 1955, untuk mengimbangi kekuatan NATO, muncul sebuah Pakta pertahanan bentukan Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur, yaitu Pakta Warsawa. Selama Perang Dingin kedua Blok Pertahanan ini terus mencoba meraih dukungan dari negara-negara lain dan meningkatkan kekuatan militer mereka. Persaingan kedua pakta militer ini berakhir saat Perang Dingin usai yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Runtuhnya negara Super power ini diikuti

dengan bubarnya Pakta Warsawa (Baranovsky 2000, hlm. 443-444). Akibatnya, NATO menjadi satu-satunya Pakta Militer yang ada di kawasan Eropa dan Atlantik Utara. Organisasi pertahanan ini mulai memperluas tujuan awalnya yaitu untuk membendung penyebaran komunisme Soviet di wilayah Eropa menjadi lebih mengarah kepada mempromosikan komunitas yang aman di Eropa Tengah dan Timur dengan mengkonsolidasikan demokrasi dan meningkatkan stabilitas keamanan. Untuk mencapai tujuannya tersebut, NATO kemudian melakukan perluasan keanggotaannya ke wilayah Eropa Timur, yang dulunya merupakan wilayah pengaruh dan kekuasaan Uni Soviet (Tchantouridze 2001, hlm. 136).

Pada tahun 1999, NATO mulai melakukan perluasannya dengan mengundang negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa untuk bergabung di dalamnya, yaitu Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, dan Polandia. Kemudian, perluasan selanjutnya pada tahun 2002 mencakup negara-negara Baltik (Estonia, Latvia, dan Lithuania), Rumania, Slovakia, Bulgaria, dan Slovenia (ketujuh negara ini diterima secara penuh sebagai anggota tetap dalam NATO pada tanggal 29 Maret 2004). Pada 1 April 2009, Albania dan Kroasia bergabung dan menjadi anggota terbaru NATO. Perluasan keanggotaan yang dilakukan oleh NATO ini mendapat respon negatif dari Rusia. Perluasan ini dianggap dapat mengganggu *security interests* dan menjadi ancaman serius bagi posisi geopolitik Rusia (NATO, hlm. 2).

Kebangkitan kekuatan militer Rusia, di mulai ketika Presiden Vladimir Putin menjabat pada tahun 2000. Putin memprioritaskan pada sektor militer dalam kurun waktu satu dekade terakhir, hingga dewasa ini, Rusia mulai menempuh kebijakan strategis, guna memulihkan kondisi dalam negeri. Rusia masih tetap berusaha untuk mengembalikan pengaruhnya pasca Perang Dunia II, terutama dalam peningkatan kekuatannya, yang merupakan sektor vital negara. Rusia juga masih memiliki persenjataan Nuklir, "warisan" Uni Soviet, dan sekarang tengah dikembangkan. Rusia memiliki keinginan untuk menjadi kekuatan baru di negara-negara pecahan Uni Soviet (Donaldson & Noguee 1998, hlm. 113).

Keamanan nasional Rusia selama ini sangat sulit untuk dijaga, karena Rusia mempunyai musuh dari masa perang dingin. Musuh tersebut adalah Blok Barat

atau NATO. Pakta Pertahanan Utara ini merupakan aliansi internasional yang diciptakan untuk mencegah agresi atau untuk menghadapi agresi tersebut terjadi. Aliansi tersebut memiliki persenjataan yang sangat canggih dibanding Rusia, kekuatan militer Rusia sangat kuat namun karena kurangnya dana untuk membeli persenjataan yang canggih dan terbatas, membuat Rusia kesulitan menangkis serangan musuh. Apalagi perluasan NATO ke wilayah Eropa membuat Rusia ketakutan apalagi negara anggotanya seperti Estonia, Latvia dan Lithuania berbatasan langsung dengan Rusia (Pushkov 1994, hlm. 78-79).

Mengingat ketiga negara tersebut merupakan negara pecahan Uni Soviet, membuat Rusia menempatkan keamanan militer di setiap perbatasan tersebut. Adanya masalah perluasan ini, ketegangan Rusia dan NATO telah dimulai pada saat pembangunan basis-basis militer di wilayah Eropa Barat dan Eropa Timur seperti Bulgaria, Rumania dan Polandia (Smith 2002, hlm. 65). Rencana itu mengundang kekhawatiran sekaligus kemarahan di kalangan masyarakat Rusia karena relokasi pangkalan itu berarti memindahkan garis depan sistem pertahanan NATO ke dekat wilayah Rusia

Keinginan ini disertai dengan memberikan pengaruh, serta merangkul negara-negara di kawasan Eropa Timur, yang dianggap sebagai *backyard* Rusia. Namun, upaya Rusia merebut kembali hegemoni di kawasan Eropa Timur ini, terkendala dengan adanya campur tangan pihak NATO yang didominasi oleh Amerika Serikat, dalam memengaruhi negara-negara tersebut. Pada Maret 2001, Presiden Putin menegaskan “garis merah” di negara-negara Baltik dalam kerangka politik luar negeri Rusia dan menentang perluasan tersebut karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi keamanan Rusia (Cornell 2001, hlm. 199). Adanya ekspansi NATO ke negara yang dekat dengan wilayah Rusia membuat negara ini merasa terancam. Hal ini membuat Rusia mengeluarkan kebijakan militer dalam bentuk doktrin militer yang upaya peningkatan kekuatan militer.



Sumber: Peta Wilayah Rusia <http://duniakaisar.blogspot.com/2011/08/islam-di-rusia-akan-menjadi-mayoritas.html>. tanggal 6 Juni 2015 pukul 14.03 WIB.

Gambar 2 Peta Wilayah Rusia

Tanpa melihat kepentingan negara lain, Amerika Serikat telah mengabaikan upaya bersama untuk membangun tatanan baru di Eropa sesuai Perang Dingin. Amerika Serikat secara sepihak memperluas jangkauan kehadiran pasukan NATO bahkan Uni Eropa sampai ke wilayah perbatasan Rusia, yaitu wilayah pecahan Uni Soviet (Global Security Org, hlm. 12). Kemudian Amerika Serikat menyatakan keinginan untuk merelokasi sejumlah pangkalan militer dari Eropa Barat ke sejumlah negara Eropa Timur, seperti: Bulgaria, Rumania, dan Polandia. Selain memperluas wilayah kekuasaannya, NATO bahkan telah membangun basis-basis militer di wilayah Eropa Barat dan Eropa Timur, seperti Bulgaria, Rumania dan Polandia.

Masuknya Negara-negara bekas Uni Soviet ini, dianggap Rusia sebagai bentuk pengkhianatan, dan akan menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan di kawasan Eropa Timur. Perluasan NATO ini, mendapat respon negatif dan kecaman keras dari Rusia. Rusia menganggap bahwa ekspansi ini merupakan salah satu ancaman dan upaya NATO dalam mempersempit hegemoni Rusia, khususnya di kawasan Eropa Timur (Kotz & Weir 2007, hlm. 160). Oleh karena itu, Rusia merasa hal ini merupakan suatu ancaman bagi eksistensinya dan berusaha mengeluarkan kebijakan serta pernyataan keras atas perluasan dan kebijakan NATO, yang di nilai dapat mengganggu stabilitas keamanan Rusia.

Pangkalan militer inipun dibuat dengan dalih, mempertahankan keamanan, sebab ancaman bagi salah satu anggota merupakan ancaman bagi seluruh negara anggota lainnya. Isu senjata nuklir kembali mengemuka di antara kedua rival ini (Rusia-NATO), sehingga hubungan di antara keduanya kembali menegang. Ketegangan tersebut dipicu oleh pembangunan sistem pertahanan misil, atau *missile defense system* NATO yang dipelopori oleh Amerika Serikat sebagai pemimpin NATO di beberapa negara di wilayah Eropa Timur, yang dulunya merupakan wilayah pengaruh dan kepentingan Rusia (Evangelista 2002, hlm. 144). Rusia memandang hal tersebut sebagai ancaman bagi wilayahnya. Akan tetapi, Amerika Serikat terus melanjutkan rencananya, bahkan telah bernegosiasi dan mencapai kesepakatan dengan beberapa negara Eropa Timur, untuk membangun sistem pertahanan misilnya, antara lain dengan: Polandia dan Republik Ceko (Hunter & Rogov 2004, hlm. 45).

Masuknya Negara-negara bekas Uni Soviet ini, dianggap Rusia sebagai bentuk pengkhianatan, dan akan menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan di kawasan Eropa Timur. Perluasan NATO ini, mendapat respon negatif dan kecaman keras dari Rusia. Rusia menganggap bahwa ekspansi ini merupakan salah satu ancaman dan upaya NATO dalam mempersempit hegemoni Rusia, khususnya di kawasan Eropa Timur. Oleh karena itu, Rusia merasa hal ini merupakan suatu ancaman bagi eksistensinya dan berusaha mengeluarkan kebijakan serta pernyataan keras atas perluasan dan kebijakan NATO, yang di nilai dapat mengganggu stabilitas keamanan Rusia.

Hal ini menambah kekhawatiran bagi Rusia, sebab akan mengancam keamanannya. Rusia kemudian memperkuat keamanan militer di setiap perbatasan negaranya. Rusia juga merencanakan berbagai kontra aksi, di antaranya adalah pengarahannya ke Ukraina yang merupakan Sekutu NATO.

1.2 Rumusan Masalah

Perimbangan militer yang terjadi antara Rusia dan NATO ini membuat Rusia lebih fokus dalam membuat kebijakan pertahanan dalam mengantisipasi ancaman keamanan dari luar dan perluasan keanggotaan NATO di Eropa Timur. Dikarenakan isu mengenai ancaman ini menjadi hal yang sangat penting bagi Rusia, maka Rusia membenahi peralatan militernya secara intensif dimulai

pada tahun 2000, yang didasari adanya doktrin militer sejak masa pemerintahan Vladimir Putin, hingga masa pemerintahan Presiden Medvedev.

Dikarenakan kebangkitan militer Rusia terjadi pada tahun masa Pemerintahan Putin inilah, Maka penelitian ini akan lebih difokuskan pada kebijakan pertahanan Rusia (sejak tahun 2008-2012) serta kebijakan pertahanan yang ditempuh Rusia dalam menangkal ancaman, serta kebijakan pertahanan terhadap perimbangan kekuatan militer dengan NATO terhadap perluasan keanggotaan NATO di Eropa Timur. Dari pembahasan yang penulis telah uraikan pada latar belakang masalah, maka penulis membatasi masalah pada kebijakan militer Rusia sejak tahun 2008-2012 serta merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan adalah, Bagaimana kebijakan pertahanan Rusia terhadap NATO yang memperluas keanggotaannya di Eropa Timur periode 2008-2012?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa yang mendasari kebijakan pertahanan Rusia.
- b. Untuk mengetahui dampak kebijakan pertahanan Rusia terhadap NATO.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua elemen dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada permasalahan yang ditulis oleh penulis sehingga tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi. Secara khususnya tulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Secara Akademis, penelitian ini dapat meberikan pengetahuan dan data dalam Studi Hubungan Internasional yang memiliki keterkaitan dengan kasus antara Rusia dengan NATO terkait wilayah perluasan di Eropa Timur.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan Kebijakan Pertahanan Rusia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk menjawab rumusan permasalahan, penelitian ini perlu melakukan tinjauan terhadap karya akademis yang memiliki kemiripan dan atau berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka akan penulis bagi menjadi dua kategori: Perluasan Keanggotaan NATO Di Eropa Timur, Kebijakan Pertahanan Rusia.

1.5.1 NATO Di Eropa Timur

Penelitian pertama adalah penelitian yang berjudul “*Culture and Security : Symbolic Power and the Politics of International Security*” yang di tulis oleh Michael C. Williams. Tulisan ini akan menganalisis konsep keamanan, power, dan dinamika perubahannya dari masa sebelum perang dingin menuju masa pasca perang dingin. Buku ini juga membahas hubungan historik antara budaya, strategi, dan keamanan. Michael C. Williams membahas mengenai pendapat Emmanuel Kant dalam perdebatan pasca perang dingin dan perdebatan mengenai relevansi NATO setelah kurang lebih empat decade eksistensinya dalam dunia internasional. Berakhirnya perang dingin tidak diikuti dengan bubarnya NATO. Buku ini menggambarkan konsep *symbolic power* dan ranah budaya keamanan dalam menjelaskan relevansi keberlangsungan peran dan aliansi NATO. Berakhirnya perang dingin membuat NATO secara otomatis tidak memiliki ancaman eksternal paska Pakta Warsawa bubar setelah perang dingin. Kondisi ini menyebabkan banyak perdebatan mengenai eksistensi keberlangsungan NATO pasca perang dingin (Williams 2007, hlm. 34). Perubahan bentuk aliansi NATO menjadi komunitas keamanan Eropa merupakan salah satu penjelasan mengenai relevansi dan eksistensi NATO pasca perang dingin.

Penelitian Kedua adalah penelitian yang berjudul “*Introduction to International Relations : Power and Justice*” yang ditulis oleh Paul Beaver. Rusia merasa terancam dengan kebijakan perluasan NATO karena dalam sejarahnya, Rusia dulunya adalah penguasa kawasan yang disebutnya sebagai “*near abroad*”, yakni wilayah yang diklaim Rusia bahwa dirinya memiliki hak alamiah untuk mendominasi wilayah-wilayah itu (yang dulu dikuasai Uni Soviet). Wilayah-wilayah ini mencangkup kawasan Eropa Timur dimana pada masa Perang Dingin pernah menjadi wilayah *sphere of influence*-nya Uni Soviet. Dalam pandangan

kaum realis, perilaku Soviet merupakan pencerminan dari upaya pemenuhan kepentingan nasional tradisionalnya (yang juga telah diupayakan pada masa Tsar Rusia berabad-abad lamanya sebelum terjadinya Revolusi Bolshevik). Kepentingan ini meliputi keinginan yang kuat unruk diakui sebagai sebuah kekuatan besar di dunia dan upaya terus-menerus untuk mengembangkan dan mempertahankan keamanan wilayah perbatasan dengan cara menjamin negara-negara periferi Soviet sebagai “*buffer zones*” yang diperintah oleh elit yang menjadi sekutu Rusia (Dannreuther 2000, hlm. 151). Dengan kata lain, Uni Soviet (atau kini Rusia) memang memiliki intensi untuk menanamkan pengaruhnya pada negara-negara sekutunya, terutama yang dekat dengan teritorialnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila kini Rusia sangat menentang kebijakan perluasan keanggotaan NATO. Dengan kebijakan ini, Rusia merasa kehilangan *power* atas negara-negara yang dulu pernah menjadi sekutunya di mana mereka kini justru berpaling kepada barat.

1.5.2 Kebijakan Pertahanan Rusia

Penelitian pertama adalah penelitian yang berjudul “Engaging Russia as Partner and Participant, The Next Stage of NATO Russia Relations ” yang di tulis oleh Robert E. Hunter dan Sergey M. Rogov. Tulisan ini akan menganalisis isu senjata nuklir dan kebijakan pertahanan Rusia terhadap NATO yang terdapat dalam penelitian ini. Isu senjata nuklir kembali mengemuka di antara kedua rival ini (Rusia- NATO), sehingga hubungan di antara keduanya kembali menegang. Ketegangan tersebut dipicu oleh pembangunan sistem pertahanan misil, atau *missile defense system* NATO yang dipelopori oleh Amerika Serikat sebagai pemimpin NATO di beberapa negara di wilayah Eropa Timur, yang dulunya merupakan wilayah pengaruh dan kepentingan Rusia. Rusia memandang hal tersebut sebagai ancaman bagi wilayahnya. Akan tetapi, Amerika Serikat terus melanjutkan rencananya, bahkan telah bernegosiasi dan mencapai kesepakatan dengan beberapa negara Eropa Timur, untuk membangun sistem pertahanan misilnya, antara lain dengan: Polandia dan Republik Ceko. Hal ini menambah kekhawatiran bagi Rusia, sebab akan mengancam keamanannya. Rusia kemudian memperkuat keamanan militer di setiap perbatasan negaranya. Rusia juga

merencanakan berbagai kontra aksi, di antaranya adalah pengarahannya rudal-rudalnya ke Ukraina yang merupakan Sekutu NATO.

Masuknya negara-negara bekas Uni Soviet ini, dianggap Rusia sebagai bentuk pengkhianatan, dan akan menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan di Kawasan Eropa Timur (Hunter, Rogov 2008, hlm. 45). Perluasan NATO ini, mendapat respon negatif dan kecaman keras dari Rusia. Rusia menganggap bahwa ekspansi ini merupakan salah satu ancaman dan upaya NATO dalam mempersempit Hegemoni Rusia, khususnya di Kawasan Eropa Timur. Oleh karena itu, Rusia merasa hal ini merupakan suatu ancaman bagi eksistensinya dan mengeluarkan kebijakan serta pernyataan keras atas perluasan dan kebijakan NATO, yang dinilai dapat mengganggu stabilitas keamanan Rusia.

Penelitian kedua adalah penelitian yang berjudul “Pewaris Kekuatan Uni Soviet” yang ditulis oleh A.Fahrudodji. Rusia ingin mendapatkan kembali status “*great power*” dan menjadi oposisi dari unilateralisme Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di NATO. Great power akan tercapai apabila Rusia menjalankan politik luar negeri yang waspada terhadap persaingan geopolitik dan mampu mempertahankan wilayah Eurasia. Banyak fakta menunjukkan bahwa keamanan suatu negara bergantung pada efektivitas kebijakan pertahanan negara serta prinsip keamanan yang dianutnya. Pentingnya kebijakan ini adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, kesejahteraan, stabilitas politik, ekonomi, social kultur, dan kepentingan militer. Tiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Penggunaan kekuatan militer khususnya ditentukan atas pandangan sejauh mana tingkat yang mengancam kepentingan nasional tersebut.

Kepentingan nasional ini yang kemudian menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan strategi keamanan *National Security Strategic* (NSC). Strategi keamanan Rusia menjelaskan bahwa Federasi Rusia menggunakan elemen-elemen negara yaitu militer, diplomasi, ekonomi, perjanjian internasional, dan alat lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Strategi keamanan membantu dalam mencegah ancaman dari luar. Strategi keamanan ini kemudian di tuangkan dalam sebuah dokumen dan yang paling penting yaitu doktrin militer. Kebijakan militer diwujudkan dalam kebijakan pertahanan yang didasarkan pada doktrin

militer. Doktrin militer Rusia dapat dibagi menjadi tiga kategori yang menyangkut kebijakan terhadap kekuatan militer dalam level internal Rusia yang meliputi angkatan darat, laut dan udara dan kebijakan militer eksternal yang menyangkut perlakuan terhadap aliansi contohnya NATO.

Doktrin militer Rusia berkonsentrasi pada perang dan pencegahannya, kekuatan bersenjata, persiapan negara dan angkatan bersenjata bila adanya agresi dan cara-cara untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah teritorial (Fahrurodji 2005, hlm. 226). Doktrin tersebut berisi dua pokok panduan yaitu pertama menyangkut kebutuhan akan personel angkatan bersenjata dan peralatan militer, yang kedua tentang penanganan perang/angkatan bersenjata. Secara spesifik, perkembangan doktrin tahun 1990 disertai dengan makin memburuknya hubungan dengan barat yang digambarkan dengan adanya intervensi barat atas urusan dalam negeri Rusia, terkait dengan adanya blok-blok militer dan aliansi, usaha untuk menghalangi kepentingan Rusia dalam pemecahan masalah keamanan internasional, serta skeptis tentang adanya musuh yang mengelilinginya. NATO dianggap sebagai musuh yang berasal dari luar. Sepanjang tahun 1990 Militer Rusia menyadari bahwa kemampuan angkatan bersenjata haruslah ditingkatkan sebab Rusia dihadapkan pada konflik bersenjata domestik maupun regional.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Teori Kebijakan Pertahanan

Untuk menyusun sistem pertahanan diperlukan adanya sebuah kebijakan pertahanan (*defense policy*). Kebijakan pertahanan merupakan rangkuman dari rencana, program, dan tindakan yang akan diambil untuk menghadapi segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, khususnya ancaman militer lawan. Kebijakan pertahanan ditujukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional dari berbagai ancaman. Kebijakan pertahanan berlaku pada saat perang dan juga saat damai, khususnya untuk *show of force* dan meningkatkan *bargaining power* dalam diplomasi politik luar negeri (*political objectives*) di tingkat global.

Carl von Clausewitz menyatakan bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Bahkan ketika kita tidak terlibat dalam perang, pemerintah sebuah negara harus menyadari bahwa pilihan pertahanan akan memiliki konsekuensi politik; *'Carl von Clausewitz declared that war was a continuation of politics by other means. Even when we are not engaged in war, politicians should be aware that the defence choices they make will have political consequences'* (Cleary & McConville 2006, hlm. 4). Ada pertanyaan Kunci dari Kebijakan Pertahanan adalah apa yang kita bela, dan mengapa kita mempertahankannya? Kebijakan Pertahanan ini ada karena adanya kepentingan nasional dalam setiap negara, dimana menurut David Chuter mengatakan bahwa pembentukan Kebijakan Nasional adalah kepentingan nasional yang menjadi pelopor dari artikulasi Kebijakan Luar Negeri, Keamanan dan Pertahanan. Pada saat negara tidak memiliki pemahaman yang jelas Mengenai kepentingan nasionalnya maka itu adalah suatu penyebab meningkatnya ketidakamanan (Cleary & McConville 2006, hlm. 39). Pada hakikatnya pemerintah dipilih untuk dapat menjaga dan mempertahankan dan membuat suatu sistem perumusan kebijakan pertahanan yang baik dan bagaimana implementasinya. Kebijakan pemerintah itu adalah bagian dari kebijakan Pertahanan dimana pemerintah mempertahankan Kepentingan nasional negara tersebut.

Dalam hal menjalankan tugasnya, Pemerintah harus memiliki Organisasi yang baik, karena Negara dengan Organisasi yang baik akan memiliki kebijakan pertahanan dengan baik pula, contohnya seperti kepolisian, layanan penjara, layanan bea cukai, pelayanan kesehatan, serta guru, petugas pemadam kebakaran, dan sejumlah spesialis dan PNS yang akan membantu mempertahankan dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan tersebut. Bentuk-bentuk kekuatan pertahanan suatu negara adalah sebagai berikut:

Badan Eksekutif Negara, badan ini dapat merumuskan dan mengubah kebijakan dalam tindakan Praktis. Mereka juga akan memberikan saran atau masukan tentang pembuatan kebijakan dan bersama dengan badan lain seperti badan legislatif secara bersama-sama merumuskan dan menetapkan sebuah kebijakan pertahanan (Cleary and McConville 2006, hlm. 46).

Kebijakan Pertahanan adalah suatu garis Hirarki di dalam kebijakan pemerintah suatu negara, Hirarki ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. *Government Policy*/Kebijakan Pemerintah: kebijakan ini bersifat Umum.
- b. *Foreign and Interior Policy*/Kebijakan Luar Negeri dan dalam Negeri: pembagian dua arah kebijakan tersebut.
- c. *Security Policy*/Kebijakan Keamanan: diantaranya (Hubungan Politik-Militer dengan tetangga dan lain-lain, Kebijakan terhadap organisasi-organisasi regional dan PBB, prioritas Intelijen, Kontrol Senjata, non-proliferasi dan rezim perjanjian, Penjaga Perdamaian dan partisipasi dalam operasi multinasional).
- d. *Defense Policy*/Kebijakan Pertahanan: dari Kebijakan Keamanan inilah lahir kebijakan Pertahanan yang dapat diartikan bahwa suatu Keamanan yang ingin dicapai maka Negara membutuhkan Pertahanan dalam memproteksi kepentingan nasionalnya. Dan ini menjadi Hirarki yang sederhana tapi bermanfaat (Cleary & McConville 2006, hlm. 33).

Kebijakan pertahanan seperti yang digambarkan diatas bersifat umum dan tidak berdiri sendiri seperti yang digambarkan dalam hirarki diatas. Kebijakan pertahanan merupakan kolaborasi dari kebijakan-kebijakan lain yang dapat mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian bagi sebuah negara.

Kebijakan pertahanan suatu negara juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan regional dan internasional (eksternal) yang meliputi kondisi politik internasional, diplomasi dan aliansi, balance of power dan penggunaan kekuatan militer secara langsung maupun tidak langsung (Cleary & McConville 2006, hlm. 46).

Masalah pertahanan keamanan selalu menjadi masalah paling penting dalam politik luar negeri suatu negara karena keduanya merupakan basis bagi eksistensi negara dan merupakan prasyarat bagi tercapainya tujuan-tujuan negara yang lain. Sebagaimana tujuan politik luar negeri pada umumnya masalah keamanan (security) suatu negara ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh Negara (Buzan 1991, hlm 45).

1.6.2 Konsep Persepsi Ancaman

Persepsi terdiri atas dari images, belief dan intentions sebagai elemen yang menentukan berbagai perilaku negara. Elemen-elemen tersebut rawan atas

miskalkulasi power negara itu sendiri maupun kekuatan lawan yang pada akhirnya menimbulkan mispersepsi atas hubungan suatu negara dengan negara lain. Pembuat keputusan adalah proses menyimpulkan dimana interaksi aktor berdasarkan ekspektasi apa yang akan negara lain lakukan berdasarkan keadaan lingkungan sekitar mereka.

Pembuatan keputusan adalah proses menyimpulkan dimana interaksi aktor berdasarkan ekspektasi apa yang akan negara lain lakukan berdasarkan keadaan lingkungan sekitar mereka. Penggunaan istilah "intentions" bukan sebagai refleksi dari negara-negara lain yang diartikan untuk mencapai tujuan khusus atau kepentingan, tetapi lebih sebagai *'the collection of actions the state will or would take because that is what others are trying to predict'*, (Dougherty & Pfaltzgraff jr 1990, hlm. 334).

Ketika aktor internasional merumuskan suatu tindakan atau kebijakan, persepsi terhadap situasi, fakta-fakta dan yang lainnya menyebabkan aktor tersebut membentuk asumsi yang mendasari suatu tindakan atau kebijakannya. Maka persepsi seorang aktor harus bisa diuji dan dimengerti jika tindakan dan kebijakan aktor tersebut ingin dimengerti.

Sedangkan menurut K.J Holsti, persepsi ancaman adalah *'man acts and reacts according to his image of the environment'* (seseorang bertindak dan memberi reaksi menurut citranya terhadap lingkungan itu), yang berarti bahwa orang akan melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka "ketahui". Tanggapan seseorang terhadap situasi tergantung pada bagaimana negara ia mendefinisikan situasi tersebut.

Menurut Holsti, sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang (universe) seseorang. Citra-citra tersebut meliputi realitas masa lalu, masa kini dan realitas yang diharapkan di masa depan, dan prefendi nilai tentang apa yang seharusnya terjadi (Holsti 1982, hlm 367). Jadi, sistem keyakinan menjalankan peranan penting bagi seseorang, karena membantunya berorientasi terhadap lingkungan, mengorganisasikan persepsi ancaman sebagai penuntun tindakan, menentukan tujuan dan bertindak sebagai saringan dalam menyeleksi informasi dalam setiap situasi.

1.7 Alur Pemikiran



Gambar 3 Alur Pemikiran

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut para ahli, setidaknya terdapat lima tahapan sebagai patokan dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu permasalahan yang terjadi dengan bantuan data pendukung dalam menjelaskan permasalahan tersebut.

b. Teknik Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library research) guna mendapatkan data-data primer dan sekunder. Data primer adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan studi terhadap dokumen-dokumen resmi ditingkat nasional maupun internasional seperti buku Strategi pertahanan Rusia tahun 2008-2012 atau buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui proses

menganalisa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dalam media internet serta data-data lainnya terkait dengan penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembabakan

Penulis membagi penelitian ilmiah ini menjadi 4 (empat) bagian. Bab-bab tersebut diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini dijelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan yang diangkat penulis untuk kemudian diteliti dan dicari pertanyaan yang sekiranya tepat dengan latar belakang permasalahan penulis. Selanjutnya di bab ini juga dibahas mengenai tujuan, manfaat serta bagian-bagian teknis dari penelitian.

BAB II ANCAMAN PERLUASAN NATO DI EROPA TIMUR

Pada bab ini dijelaskan mengenai ancaman perluasan NATO di eropa timur yang menjadi masalah utama Rusia terhadap permasalahan keamanan nasional Rusia di Eropa Timur. Bentuk ancaman juga akan dijelaskan dalam bab ini yang menjadikan Rusia mengeluarkan kebijakan pertahanan terhadap NATO.

BAB III KEBIJAKAN PERTAHANAN RUSIA TERHADAP NATO DI EROPA TIMUR

Pada bab ini dijelaskan mengenai dampak kebijakan pertahanan Rusia terhadap NATO yang terlibat perselisihan di Eropa Timur. Selain itu bab ini juga menjelaskan bagaimana awal dari intervensi NATO terhadap wilayah Eropa Timur yang kemudian menjadi penyebab perselisihan di Eropa Timur.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dilakukan penulis beserta saran yang sekiranya dapat menjadi masukan bagi para pembaca sekalian.